

DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL BUDAYA DI KOTA MAKASSAR: MEMUDARNYA STRATIFIKASI SOSIAL BERBASIS KETURUNAN

THE DYNAMICS OF SOCIO-CULTURAL GROUP IN MAKASSAR: THE ECLIPSE OF ANCESTOR-BASED SOCIAL STRATIFICATION

Rochmawati

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI
rochmawatiharis@yahoo.com

Abstrak

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki masyarakat sangat heterogen. Heterogenitas sosial tersebut turut dikonstruksikan pula oleh keberadaan empat etnis besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja, menganggap diri mereka sebagai kelompok "elite" karena memiliki strata sosial paling tinggi dibandingkan yang lain. Namun, stratifikasi sosial ini lama kelamaan luntur, begitu juga gelar kebangsawanan makin memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas pada kegiatan upacara adat atau ritual saja. Status sosial tidak lagi semata-mata didasarkan pada keturunan atau status kebangsawanan seseorang, melainkan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tulisan ini membahas dinamika kewargaan kelompok-kelompok sosial budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan Kota Makassar.

Kata kunci: dinamika sosial, kelompok sosial budaya, kewargaan, stratifikasi sosial, Kota Makassar, Bugis-Makassar.

Abstract

Makassar as the capital city of South Sulawesi province has a diverse society. This social diversity is contributed by four big ethnics, which are Bugis, Makassar, Mandar, and Toraja. People whose ancestor is a patrician often claimed themselves as an elite group, the highest social level amongst others. Thus, this social stratum and patrician title have gradually disappeared, and as a result this usage is very limited during special custom ceremony. Stratum is no longer judged by ancestry or title, but mostly determined by the level of education. This paper explains the dynamic citizenship of socio-cultural groups which interact one another in Makassar.

Keywords: social dynamic, socio-cultural groups, citizenship, social stratum, Makassar, Bugis-Makassar.

Pendahuluan

Studi tentang dinamika kewargaan kelompok sosial di perkotaan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari pola dan kecenderungan relasi sosial yang tumbuh, berkembang, dan akhirnya terbentuk di antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Salah satu aspek yang penting dikaji terkait hal itu adalah terbentuknya pola dan kecenderungan relasi sosial atas dasar latar belakang budaya kelompok-kelompok sosial di perkotaan. Heterogenitas kelompok-kelompok sosial atas dasar perbedaan latar belakang budaya diduga turut mempengaruhi dinamika kewargaan kelompok sosial di perkotaan.

Salah satu kota yang menarik untuk mengkaji dinamika kewargaan kelompok-kelompok sosial adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, Kota Makassar yang kini dianggap sebagai pintu gerbang Indonesia

Timur, telah tumbuh menjadi kota metropolitan yang mengundang hadirnya berbagai kelompok sosial yang memiliki latar belakang budaya berbeda satu sama lain namun dituntut untuk saling berinteraksi sebagai warga perkotaan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Begitu besarnya daya tarik Makassar bagi para pendatang dari luar daerah dan bahkan luar pulau, sehingga dapat diibaratkan ibukota Sulawesi Selatan ini sebagai "gula" yang setiap saat dikerubuti "semut", maksudnya banyak warga pendatang yang mencari kehidupan baru yang lebih baik di Kota Makassar.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak membahas dinamika kewargaan kelompok-kelompok sosial budaya yang saling berinteraksi dalam kehidupan metropolitan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa pertanyaan yang akan dibahas di antaranya adalah: (1) Bagaimana pola relasi kelompok-kelompok sosial budaya yang ada di Kota Makassar?; (2)

Sejauh mana perbedaan latar belakang budaya kelompok-kelompok sosial yang ada di Makassar tersebut mempengaruhi dinamika kewargaan yang terbangun di antara mereka sebagai warga kota metropolitan?

Sebelum menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini terlebih dahulu diawali dengan pembahasan tentang profil sosial budaya Kota Makassar, dilanjutkan dengan melihat perkembangannya secara historis, kemudian stratifikasi dan jaringan sosial kelompok-kelompok sosial budaya yang ada, modal sosial yang dimiliki, dan diakhiri pembahasan tentang pengaruh kelompok-kelompok sosial budaya terhadap dinamika kewargaan masyarakat Kota Makassar.

Dinamika Sosial Kota Makassar

Menurut sejarahnya, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian dan pusat pendidikan di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain itu Sulawesi Selatan mewarisi tradisi kerajaan yang cukup kuat, diantaranya yakni Bone, Gowa, dan Luwu. Ketiga kerajaan ini merupakan kerajaan besar dan sangat berpengaruh baik di Sulawesi Selatan maupun di luar daerahnya (di wilayah Indonesia). Dengan memiliki tradisi seperti itu dan dalam konteks perkembangan demokrasi saat ini, wilayah Sulawesi Selatan menjadi daerah yang kaya, terutama dalam hal pengalaman interaksi antara warisan budaya yang kuat dengan keharusannya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kalau dilihat dari latar belakang sejarahnya, Provinsi Sulawesi Selatan (Bone, Gowa, dan Luwu) merupakan satu kerajaan besar di mana rajanya telah melakukan kawin mawin, seperti contohnya anak raja Gowa menjadi raja Bone, kemudian anaknya raja Bone kawin dengan anaknya raja Luwu dan begitu seterusnya. Faktor kelompok-kelompok atas dasar primordial tersebut kemudian tumbuh pesat pada era reformasi dan otonomi daerah. Pengelompokan dan pengkotakan itu misalnya seperti kelompok Bugis, kelompok Makassar dan sebagainya. Padahal jika kita lihat pada masa lalu tidak ada yang namanya pengkotakan-pengkotakan seperti itu.

Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah urban yang dipadati oleh penduduk dari berbagai daerah. Dengan kata lain, penduduk kota Makassar termasuk heterogen karena penduduknya terdiri dari beberapa etnis atau suku. Penduduk

Sulawesi Selatan memiliki 4 (empat) etnis atau suku besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Sementara itu, penduduk pendatang di antaranya berasal dari Jawa, Sunda, Minang, Minahasa, dll. Lebih lanjut, penduduk pendatang di kalangan mahasiswa pada umumnya berasal dari wilayah-wilayah Indonesia bagian timur seperti Flores, Bima dan Maluku. Agama yang dianut oleh penduduk kota Makassar mayoritas adalah agama Islam dan penduduknya terkenal religius dalam menjalankan kehidupan agamanya. Penduduknya selain beragama Islam ada juga yang beragama Kristen, Katholik, Protestan, Hindu dan Budha. Etnis atau suku Bugis, Makassar, dan Mandar mayoritas beragama Islam, sedangkan untuk etnis atau suku Toraja mayoritas beragama Kristen. Jika dilihat pada jalur birokrasi atau jalur pemerintahan, pada umumnya didominasi oleh etnis Bugis-Makassar.

Dari segi penduduk, Kota Makassar pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Penyebaran penduduk kota Makassar tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dan penduduknya masih terkonsentrasi di wilayah kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 170.878 jiwa atau sekitar 12,76%, kemudian di kecamatan Biringkanaya sebanyak 167.741 jiwa atau sekitar 12,52%, kecamatan Rappoeini sebanyak 151.091 jiwa atau sekitar 11,28%, jumlah yang terendah adalah di wilayah kecamatan Ujungpandang, yaitu 26.904 jiwa atau sekitar 2,01%. dan selebihnya tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu di kecamatan Mariso, Mamajang, Makassar, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Tallo, Panakukang, Manggala, dan Tamalanrea.¹

Jika melihat laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan setiap tahun selalu bertambah sebagai akibat dari urbanisasi, secara tidak langsung Kota Makassar telah menjadi kota urban sekaligus pusat perdagangan, pendidikan, dan pusat pemerintahan. Oleh karena itu, Kota Makassar, khususnya pemerintah wilayah kota, telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan, seperti kawasan perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Kota Makassar telah memperkenalkan dirinya sebagai kota metropolitan dan merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia bagian timur.

¹Sumber data, BPS Kota Makassar, Makassar Dalam Angka 2011.

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Kota Makassar tersebut terlihat bahwa Makassar merupakan kota yang sangat strategis jika dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dilihat dari faktor ekonomi, Kota Makassar sebenarnya bisa menjadi simbol keberhasilan bagi wilayah Indonesia timur. Namun, selama ini Kota Surabaya lebih dikenal sebagai *home base* pengelolaan produk-produk untuk kawasan timur Indonesia, sehingga kota Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal, jika melihat kondisi geografisnya, Kota Makassar sangat memungkinkan untuk dikembangkan, dan Kota Makassar juga telah mampu membuktikan diri sebagai pusat pengembangan wilayah terpadu di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, Kota Makassar saat ini memiliki daya tarik tersendiri, sehingga masyarakat daerah lain berbondong-bondong datang untuk mencari pekerjaan atau “kehidupan baru” yang memberikan suatu pengharapan bagi setiap orang, khususnya para pendatang.

Sebagai bekas wilayah kerajaan pada masa lalu, maka kalangan bangsawan masih sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan, terutama di bidang sosial politik. Masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan Bugis yang bergelar “Andi” dan keturunan bangsawan Makassar yang bergelar “Karaeng”, menurut sejarahnya menempati posisi yang terhormat di mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan memiliki tanah yang cukup luas dan di antara mereka banyak yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan politisi. Masyarakat keturunan bangsawan, baik yang berasal dari bangsawan Bugis maupun Makassar, termasuk ke dalam “kelompok elite” bersama-sama dengan kalangan profesional, pengusaha, intelektual, juga agamawan, bergabung dan bekerja sama dengan baik.

Berdasarkan sejarahnya, Kota Makassar dan Kabupaten Bone mempunyai keterkaitan dengan masa lalu, yaitu kota Makassar terkait dengan kerajaan Gowa, sedangkan kabupaten Bone terkait dengan kerajaan Bone. Saat ini, sisa-sisa feodalisme masih cukup tampak dalam hierarki struktur sosial dengan adanya semacam pembagian kelas antara kelompok bangsawan (dengan sebutan “Andi”, “Karaeng”, atau semacamnya) dengan kelompok bukan bangsawan. Para keturunan bangsawan tersebut sekarang ini masih mempunyai pengaruh dan peran di

Sulawesi Selatan, termasuk di pemerintahan lokal. Perlu diketahui bahwa menurut sejarahnya pemberian gelar-gelar kebangsawanan seperti “Andi”, “Daeng, dan “Karaeng” merupakan peninggalan masa lalu yaitu pemberian dari pemerintahan kolonial Belanda. Sementara itu, pengembangan egalitarianisme dan demokratisasi di wilayah itu khususnya di wilayah Bone yang tradisi kebangsawanannya masih kuat dan masyarakatnya relatif homogen dibanding Makassar terhambat salah satunya oleh hierarki sosial yang telah mentradisi ratusan tahun lamanya (Ratnawati, 2006: 147-182).

Jika dilihat dari sistem kekerabatan, pada masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan Kota Makassar khususnya, hubungan kekerabatan merupakan aspek utama, baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun karena fungsinya sebagai struktur dasar yang membentuk tatanan masyarakat. Pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip kekerabatan sangat diperlukan untuk memahami apa yang mendasari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis-Makassar yang saling berkaitan dalam membentuk tatanan sosial mereka. Aspek tersebut antara lain perkawinan, hirarki sosial, kekuasaan, dan pengaruh pribadi.

Sebagaimana umumnya masyarakat Austronesia, khususnya orang-orang Nusantara seperti Melayu, Jawa, Kalimantan dan Filipina, orang Bugis-Makassar menganut sistem kekerabatan bilateral. Kelompok kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalui garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu. Suatu hal yang sangat umum berlaku di kalangan masyarakat Eropa, meskipun tidak terlalu universal. Sebaliknya, sistem kekerabatan kebanyakan masyarakat non-Eropa, yang diteliti ahli-ahli antropologi, pada umumnya menganut prinsip patrilineal atau matrilineal.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar yang terpenting adalah memiliki garis keturunan nenek moyang dari bapak dan ibu, mulai dari yang terdekat hingga kerabat jauh yang berasal dari lima lapis nenek moyang yang menurunkan berbagai lapis sepupu mereka. Hubungan kekerabatan itu biasanya disebut dengan istilah *a'seajingeng* yang artinya mempunyai asal usul yang sama. Jauh dekatnya hubungan kekerabatan ditentukan oleh lapisan leluhur yang menghubungkan mereka. Hubungan berdasarkan nenek moyang tersebut, baik dari pihak bapak

maupun ibu, menyatukan mereka dalam suatu sistem kekerabatan dan memisahkan mereka dengan orang lain (*tau laeng*). Masyarakat Bugis-Makassar tidak memiliki suatu kelompok kekerabatan bilateral yang mengutamakan salah satu pasangan nenek moyang saja, sebagaimana halnya orang Toraja tetangga mereka yang hanya memusatkan inti kelompok keluarga masing-masing pada sebuah rumah keluarga (*tongkonan*). Hal yang terpenting bagi masyarakat Bugis-Makassar adalah dicapainya derajat yang tinggi dalam sistem stratifikasi sosial (Pelras, 2006). Namun, pada masa sekarang, sistem stratifikasi sosialnya mulai mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan jaman.

Stratifikasi Sosial Masyarakat Kota Makassar

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya. Stratifikasi berasal dari kata *stratum* yang berarti strata atau lapisan dalam bentuk jamak. Sebagaimana Pitirin A. Sorokin mendefinisikan stratifikasi sebagai pembedaan penduduk atau anggota masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis, Bruce J. Cohen juga menjelaskan bahwa sistem stratifikasi akan menempatkan setiap individu pada kelas sosial sesuai berdasarkan kualitas yang dimiliki. Sementara itu, menurut Max Weber, yang dimaksud dengan stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, *previllege*, dan *prestise*.

Sistem stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Faktor yang menyebabkan stratifikasi sosial dapat tumbuh dengan sendirinya adalah berdasarkan faktor kepandaian, usia, sistem kekerabatan, dan harta seseorang dalam batas-batas tertentu.

Sifat sistem stratifikasi sosial di dalam masyarakat dapat bersifat tertutup (*closed social stratification*), terbuka (*open social stratification*), dan campuran. Sistem stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tetapi sangat terbatas pada mobilitas horisontal saja. Sementara itu, stratifikasi sosial terbuka lebih bersifat dinamis

karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggotanya dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horisontal. Lebih lanjut, sistem stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka.²

Sistem stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Pelapisan sosial masyarakat yang tajam memang merupakan suatu ciri khas bagi masyarakat Sulawesi Selatan (Mattulada, 1998). Sejak masa pra-Islam, masyarakat Sulawesi Selatan sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Stratifikasi sosial ini mengakibatkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah.

Sistem stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar sejak dahulu telah memberikan posisi yang istimewa dan kedudukan yang strategis terhadap kaum bangsawan sebagai elite jika dibandingkan kelompok masyarakat lainnya dalam struktur sosial yang ada. Para bangsawan tersebut menjadi pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan dan kasta-kasta atau golongan-golongan tersebut dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan terkenal sebagai masyarakat yang sangat ketat mempertahankan aturan pelapisan sosial. Sehubungan dengan penempatan posisi bangsawan dalam stratifikasi sosial ini, di dalam masyarakat Bugis-Makassar terdapat hubungan yang sangat kompleks antara individu yang satu dengan individu lainnya. Seperti kita ketahui bahwa pada masa lalu hubungan-hubungan yang paling erat adalah hubungan antara bangsawan dan para pengikutnya.³

²(<http://sosiologiuntukindonesia.blogspot.com/2012/02/makalah-stratifikasi-sosial.html>). Senin, 13 Februari 2012.

³Najamuddin, "Rivalitas Elite Bangsawan Dengan Kelompok Terdidik Pada Masa Revolusi: Analisis terhadap Pergulatan Nasionalisme Lokal di Sulawesi Selatan menuju NKRI", Prosiding Seminar

Kelompok bangsawan dalam masyarakat Sulawesi Selatan dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu:

- (1) Kelompok bangsawan yang sudah modern;
- (2) Kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi.

Kelompok bangsawan yang sudah modern adalah mereka yang sudah mau membuka diri dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam kehidupan lingkungan pekerjaan. Hal ini terjadi karena mereka pada umumnya memiliki pendidikan yang cukup tinggi dan mampu menyekolahkan anak-anaknya keluar Sulawesi Selatan, seperti kota-kota besar di Pulau Jawa. Sementara itu, kelompok bangsawan yang masih mempertahankan primordial yang sangat tinggi adalah mereka yang dalam kehidupannya masih “agak tertutup”, tidak begitu peduli dengan pentingnya pendidikan, mereka terlalu kuat ikatan emosional masa lalu. Meskipun mereka mendapat tempat teratas dan sangat dihormati dalam masyarakatnya, mereka tidak menyadari bahwa situasi dan kondisi pada saat ini sudah sangat berbeda. Seperti dikemukakan oleh seorang narasumber, Drs. H.S. MSi, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang pada masa lalu sangat dihormati dan bahkan disegani karena berasal dari keturunan bangsawan⁴. Namun, karena situasi yang ada telah mengubah segalanya, misalnya orang tua dari yang bersangkutan meninggal, juga tidak memiliki pendidikan yang cukup, dan harta kekayaan peninggalan orangtua sudah habis, mereka akhirnya sudah tidak mendapat tempat di mata masyarakat. Pada umumnya masyarakat menyikapi kondisi seperti ini hanya dengan memberikan pengakuan dan penghormatan saja bahwa yang bersangkutan betul-betul keturunan bangsawan, tidak lebih dari itu.

Jika pada masa kini kaum bangsawan atau keturunan bangsawan ada yang masih tetap eksis, baik di lingkungan pemerintahan maupun di sektor lain, hal ini disebabkan karena adadua faktor penting, yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Bagi keturunan bangsawan yang masih eksis hingga kini penyebabnya

adalah karena keluarga bangsawan pada umumnya disekolahkan sampai ke jenjang paling tinggi, yaitu perguruan tinggi, dan juga ditunjang oleh faktor ekonomi keluarga yang cukup kuat. Biasanya masyarakat yang berasal dari kalangan keturunan bangsawan seperti ini menduduki jabatan tertentu di lingkungan pemerintahan. Sementara itu, bagi masyarakat keturunan bangsawan yang tidak memiliki pendidikan dan tidak didukung oleh faktor ekonomi keluarga, mereka umumnya tidak dihargai lagi, sehingga lama kelamaan akan tersingkirkan secara alamiah. Oleh karena itu, kedua faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi keturunan bangsawan yang masih eksis keberadaannya, khususnya di wilayah Kota Makassar.

Menurut sejarahnya, di wilayah Sulawesi Selatan pada masa lalu terdapat empat kelompok masyarakat, yaitu:

- (1) Kelompok bangsawan,
- (2) Kelompok pemodal/pengusaha,
- (3) Kelompok hulubalang/panglima perang, dan
- (4) Kelompok tokoh agama.

Keempat kelompok masyarakat inilah yang mempunyai kelas tersendiri, seolah-olah mereka merupakan kelas elite, merasa berada di atas struktur masyarakat biasa. Di antara keempat kelompok masyarakat ini telah terjadi perkawinan campur atau kawin mawin, sehingga kelompok-kelompok inilah yang banyak melahirkan keturunan, terutama di wilayah Bone. Perkawinan campur di antara keempat kelompok sudah terjadi sejak jaman dulu. Pada masa lalu jarang sekali terjadi perkawinan campur antara kelompok bangsawan, pemodal/pengusaha, hulubalang/panglima perang, dan tokoh agama dengan kelompok masyarakat biasa. Seandainya terjadi perkawinan campur di antara keempat kelompok tersebut dengan masyarakat biasa, hal itu harus melalui pertimbangan yang cukup panjang dan prosesnya sangat rumit. Namun, untuk masa sekarang, sudah terjadi pergeseran; masyarakat biasa banyak yang melakukan perkawinan dengan keempat kelompok masyarakat tersebut, meskipun harus melalui aturan-aturan yang berlaku dikalangan keempat kelompok masyarakat itu.

Terkait dengan lembaga perkawinan, khususnya di kalangan suku Bugis-Makassar, tampaknya memegang peranan penting, bahkan acapkali terkait kepentingan politik. Semakin luas jaringan keluarga, semakin luas pula

Nasional Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, Vol. 2, Januari - Desember 2017.

⁴Wawancara dengan Drs. H.S.M.Si, Kabag Tata Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 29 Mei 2012 di Makassar.

pengaruh kelompok tersebut. Oleh karena itu, poligami di kalangan bangsawan merupakan salah satu indikator untuk membentuk sebuah jaringan dan dukungan. Selain itu, poligami mempunyai simbol “keperkasaan” si bangsawan itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang narasumber yang mengatakan bahwa pada masyarakat Sulawesi Selatan terkenal dengan tiga U, yaitu Ujung Pena, Ujung Lidah, dan Ujung untuk kawin-mawin. Faktor yang ketiga inilah yang menjadikan kebangsawanan seseorang samar sebagai akibat dari adanya perkawinan campur antara masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa yang memang sudah banyak terjadi. Akibatnya, masyarakat yang bukan keturunan bangsawan atau masyarakat biasa menjadi ikut-ikutan merasa dirinya berasal dari keturunan bangsawan hanya karena kemampuannya menggunakan Ujung yang ketiga.

Hal tersebut juga sudah terjadi di dunia kampus; bisa kita lihat di kampus-kampus para mahasiswa sudah memiliki tiga Ujung. Cara penghormatan pun tidak lagi mengikuti pola kebangsawanan karena para mahasiswa pada umumnya sudah mempunyai ketiga ujung tadi, yaitu Ujung Pena sehingga mereka bisa memperoleh kepintaran atau kepandaian melalui pendidikan, kemudian pandai berbicara melalui Ujung Lidah, dan yang terakhir para mahasiswa bisa melakukan kawin campur dengan siapa saja dengan tidak perlu melihat calon pasangannya berasal dari kelompok mana.⁵

Jika dilihat, masyarakat Sulawesi Selatan pada masa kini sudah sangat terbuka dan tidak terlalu ketat lagi dalam tradisi, meskipun masih ada pengaruh-pengaruh dari kelompok atau golongan. Namun, untuk daerah-daerah tertentu pengaruh-pengaruh tradisi ini sangat kuat. Dapat kita lihat untuk daerah-daerah yang masyarakatnya sudah terbuka, seperti Makassar, Pare-Pare, dan Palopo, sudah mulai lemah dari pengaruh-pengaruh kelompok atau golongan atas dasar sistem feodal karena sudah banyak fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai keturunan bangsawan sudah menyesuaikan dengan kelompok rasional di lingkungan sekitarnya. Kelompok rasional di sini maksudnya adalah mereka yang mencoba mengembangkan diri melalui jalur-jalur birokrasi.

⁵Wawancara dengan narasumber Dr. R, Sekretaris Jurusan Sosiologi UNHAS, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar.

Seperti di kota Makassar sendiri bisa dilihat pada beberapa jalur birokrasi tidak lagi dipegang atau dikuasai oleh keturunan bangsawan melainkan dari berbagai kalangan atau dari berbagai lapisan masyarakat lainnya.

Kondisi tersebut tampaknya agak berbeda dengan di wilayah Gowa yang peta kekuasaannya masih terpusat ke tangan keturunan bangsawan. Perlu diketahui juga bahwa penghargaan terhadap keturunan bangsawan di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar relatif masih tinggi tetapi bukan berarti hal itu menjadi faktor kunci, terutama dalam menentukan pemilihan kepala daerah. Diakui pula oleh sebagian masyarakat bahwa ada sekelompok keturunan bangsawan yang mulai ditinggalkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Hal itu menunjukkan indikasi bahwa kekuatan kelompok keturunan bangsawan mulai melemah meskipun bukan berarti hilang sama sekali.

H.J. Friedericy dalam buku *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (1976) oleh Prof. Dr. Koentjaraningrat mengatakan bahwa pelapisan masyarakat Bugis-Makassar sudah ada sejak jaman sebelum pemerintah kolonial Belanda menguasai langsung daerah Sulawesi Selatan. Salah satu sumber yang digunakan untuk melakukan rekonstruksinya adalah buku asli kesusasteraan Bugis-Makassar *La Galigo*. Pada masa lalu masyarakat Bugis-Makassar memiliki sistem kemasyarakatan atau pelapisan sosial yang terbagi kedalam tiga tingkatan atau yang biasa disebut dengan sebutan “kasta”. **Pertama**, Ana Karaeng (Makassar), tingkatan kasta ini merupakan tingkatan kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat. Kasta ini merupakan kasta yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan kalangan raja-raja yang mempunyai kekuasaan serta menguasai perekonomian dan pemerintahan.

Kedua, Tu Maradeka (Makassar), kasta kedua ini dalam sistem kemasyarakatan Bugis-Makassar merupakan kumpulan masyarakat atau orang-orang yang merdeka (bukan budak atau ata). Pada umumnya masyarakat Bugis-Makassar mayoritas berstatus pada kasta kedua ini. **Ketiga**, Ata. Kasta ini merupakan kasta yang paling rendah dalam strata sosial masyarakat. Ata atau kasta ini adalah masyarakat yang merupakan budak atau abdi yang biasanya diperintah oleh kasta pertama dan kedua. Pada umumnya mereka menjadi budak lantaran tidak

mampu membayar utang, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya.

Dalam usahanya untuk mencari latar belakang terjadinya stratifikasi sosial pada masyarakat Bugis-Makassar, Friedericy berpedoman kepada peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam La Galigo dan berkesimpulan bahwa masyarakat Bugis-Makassar itu pada awalnya hanya terdiri dari dua lapisan dan bahwa lapisan Ata merupakan suatu perkembangan kemudian yang terjadi dalam jaman perkembangan dari organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi Selatan. Seiring dengan perkembangan jaman, pelapisan sosial paling bawah, yaitu Ata, mulai hilang, karena ada larangan dari pihak pemerintah kolonial dan desakan agama. Begitu juga dengan Ana Karaeng serta Tu Maradeka secara perlahan-lahan turut hilang karena adanya desakan dan tuntutan perubahan.

Akan tetapi stratifikasi masyarakat Bugis-Makassar sudah mulai luntur seiring dengan perkembangan jaman; sistem kerajaan mulai runtuh dan kekuasaan diganti oleh pemerintahan Belanda. Hal ini merupakan akibat dari larangan pemerintahan Belanda kepada masyarakat Bugis-Makassar untuk menggunakan strata sosial serta desakan agama, terutama agama Islam, yang melarang adanya klasifikasi status sosial berdasarkan kasta. Pengaruh ini terlihat sampai menjelang abad ke-20, terutama pada kasta Ata mulai hilang. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, kasta Ana Karaeng dan Tu Maradeka mulai berangsur-angsur hilang juga dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Akan tetapi, penggunaan “Andi”, “Karaeng”, “Petta”, dan “Puang”, memang masih digunakan tetapi terbatas pada kegiatan ritual adat saja dan sebagai sebuah penghormatan.

Dalam ruang lingkup NKRI, ketiga kasta yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan dianggap menjadi penghambat, apalagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi tidak cocok lagi dengan penggunaan sistem kasta tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, agar tidak menggunakan tingkatan kasta dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam ruang lingkup pekerjaan, seperti di lingkungan pemerintahan, swasta, dll. Penggunaan kasta ruang lingkungannya dibatasi cukup hanya di lingkungan keluarga saja atau pada upacara-

upacara adat yang memang masih dipegang sampai saat ini.

Untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, stratifikasi sosial masyarakatnya sudah tidak terlalu ketat lagi; sudah mulai berubah dan mulai terbuka. Stratifikasi sosial masyarakat yang sudah mulai terbuka dapat dilihat pada tatanan, seperti kalau seseorang yang bukan berasal dari keluarga keturunan bangsawan bisa mendapatkan kekuasaan atau suatu jabatan tertentu maka yang bersangkutan akan diperlakukan seperti bangsawan. Misalnya, seorang bupati atau walikota, meskipun yang bersangkutan jelas-jelas bukan berasal dari keluarga keturunan bangsawan, tetapi diperlakukan seperti keluarga bangsawan. Sebaliknya jika seseorang berasal dari keturunan bangsawan tetapi tidak memiliki kekuasaan maka gelar bangsawan dari orang tersebut hanya diberikan sebatas penghargaan atau penghormatan saja, tetapi bukan berarti menghilangkan asal mula keturunan kebangsawannya. Hubungan antara keturunan bangsawan dengan masyarakat biasa yang bukan berasal dari keturunan bangsawan yang mempunyai kekuasaan, termasuk di jalur pendidikan, sudah tidak ketat lagi. Oleh karena itu, pada masa sekarang di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar, masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan mulai mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat yang sudah ada. Tujuan dari mengaktifkan kembali lembaga adat ini adalah supaya generasi muda yang ada sekarang tidak kehilangan jejak leluhur mereka dari keturunan bangsawan.

Jaringan Sosial Masyarakat Kota Makassar

Tampaknya masyarakat Kota Makassar mempunyai kelompok-kelompok berdasarkan kedaerahan dan cenderung memiliki kerja sama yang cukup baik. Kelompok-kelompok tersebut tumbuh dan berkembang, sehingga membentuk kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan satu kesatuan yang tumbuh bersama, yaitu adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi yang di dalamnya terdapat sikap saling tolong menolong. Jika melihat arti atau fungsi kelompok sosial sangat jelas sekali bahwa keberadaan kelompok sosial ini sangat membantu masyarakat dalam menemukan kesamaan visi dan misi dalam berbagai aspek kehidupannya. Selain itu, tampaknya ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya kelompok-kelompok sosial tersebut, yaitu mempunyai kepentingan yang sama, keturunan

yang sama, geografis yang sama, dan memiliki daerah asal yang sama.

Kemudian kelompok-kelompok sosial tersebut memiliki jaringan kelompok kedaerahan yang tidak bisa dipungkiri lagi cukup menonjol. Ikatan berdasarkan kedaerahan ini terlihat dari menjamurnya berbagai kelompok paguyuban atas dasar etnis ataupun daerah asal. Kegiatan dari kelompok-kelompok tersebut pada umumnya lebih bersifat sosial, seperti kegiatan pengumpulan bantuan dana untuk masjid, bantuan dana bagi yang tidak mampu, dan khususnya bantuan pendidikan.

Meskipun cukup banyak paguyuban atas dasar kedaerahan, mereka saling menghormati satu sama lain. Sementara itu, masyarakat Makassar sendiri sangat menghormati budaya yang mereka miliki dan sudah dipegang turun temurun serta dihormati oleh mereka, yaitu budaya *siri* atau harga diri atau rasa malu. Seandainya seseorang sudah merasa dipermalukan, maka yang bersangkutan harus melakukan perlawanan untuk menutupi rasa malunya tersebut. Bahkan harus rela berkorban dengan mengorbankan jiwanya. Sebaliknya, jika seseorang dipermalukan dan tidak melakukan tindakan atau perlawanan, dia dianggap tidak memiliki rasa malu atau sudah tidak memiliki budaya *siri* tersebut.

Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya etnis Bugis-Makassar, memiliki etos hidup atau nilai budaya luhur sebagai proses pembelajaran yang telah diwariskan secara turun temurun, serta dapat mempengaruhi pikiran dan pola hidup masyarakatnya. Etos hidup masyarakat Bugis-Makassar terkenal dengan *siri na pesse*. *Siri* sendiri mempunyai arti rasa malu, sangat erat hubungannya dengan harkat, martabat, kehormatan, dan harga diri. Sementara itu, *pesse* mempunyai arti mengandung rasa belas kasihan, kepedihan, solidaritas, serta semangat tolong menolong dengan sesamanya. Arti keseluruhan dari *siri na pesse* adalah harkat martabat dan rasa pedih yang sangat mendalam yang melahirkan adat yang mengatur watak, moral, dan sikap hidup masyarakat Sulawesi Selatan.

Apabila seseorang dipermalukan dan tidak melakukan reaksi atau perlawanan, orang itu disebut *degage siri'na/tena siri'na* dan tidak mendapat tempat di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Sulawesi Selatan sangat menjunjung tinggi *siri* atau harga diri atau rasa malu tersebut. Adanya budaya *siri* ini sangat

memotivasi kekuatan kelompok atau paguyuban-paguyuban itu sendiri. Kelompok atau paguyuban tersebut sifatnya permanen meskipun kegiatan-kegiatannya lebih bersifat temporer.

Masyarakat Bugis-Makassar secara keseluruhan, dan masyarakat kota Makassar khususnya, juga memiliki etika yang mengatur dalam kehidupan, yaitu sangat menghargai tata krama atau sopan santun yang dikenal dengan *sipakalebbi* yang artinya adalah sifat saling tolong-menolong, *sipakatauyang* artinya saling menghargai sebagai sesama manusia, dan *sipakainga* yang artinya saling mengingatkan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang atau masyarakat dituntut atau diharuskan untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan, memiliki sifat tolong menolong, saling menghargai, serta saling mengingatkan. Akan tetapi, jika ada orang atau anggota masyarakat yang tidak bisa memperlakukan orang lain dengan cara-cara tadi atau tidak berpedoman kepada *sipakalebbi*, *sipakatauyang*, dan *sipakainga*, maka yang bersangkutan akan mendapat balasan dengan lebih tidak sopan lagi dan diperlakukan secara anarkis.⁶

Salah satu paguyuban kelompok-kelompok berdasarkan etnis atau kedaerahan yang ada di wilayah kota Makassar adalah kelompok atau paguyuban "Bosowa", yaitu kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng, dan Wajo. Perkumpulan lainnya adalah "Bosowasipalu" yang merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Palopo, dan Luwu. Seperti telah diuraikan di atas kegiatannya lebih bersifat sosial dan perlu diketahui juga bahwa solidaritas kedaerahannya sangat kuat.

Akan tetapi, mulai ada pergeseran fungsi dari paguyuban tersebut, yaitu ketika akan diadakan pemilihan kepala daerah maka paguyuban berfungsi sebagai alat untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah. Setelah beralih fungsi, sering dijumpai bahwa tim sukses dari masing-masing partai ada di dalam paguyuban, sehingga kegiatan dari paguyuban tersebut lebih terfokus pada usaha memenangkan pemilihan kepala daerah ketimbang kegiatan sosial. Kegiatan dari kelompok-kelompok paguyuban ketika menjelang pemilihan

⁶Wawancara dengan narasumber S, Humas DPRD Kota Makassar, tanggal 30 Mei 2012 di Makassar.

kepala daerah sangat “heroik” sampai ke pelosok-pelosok daerah, tetapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan penuh dengan muatan politis. Bahkan keberadaan paguyuban dianggap sebagai mesin untuk mendulang suara dalam pilkada. Akan tetapi, ketika pilkada berakhir maka kegiatan paguyuban-paguyuban tersebut kembali kepada fungsi semula, yakni kegiatan sosial.

Diakui juga oleh seorang narasumber bahwa di antara paguyuban tersebut pernah terjadi gesekan-gesekan, termasuk gesekan karena persoalan pribadi, yang kemudian berkembang menjadi masalah yang cukup besar dan serius, seperti perselisihan antardaerah, misalnya antara Bugis-Makassar, bahkan pernah terjadi juga perselisihan antaranggota etnisnya sendiri. Sebagai akibatnya, maka muncullah persoalan-persoalan pribadi yang dihubungkan dengan asal daerah masing-masing, sehingga tidak mustahil persoalannya meluas kepada masalah budaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah SARA. Hal seperti ini sering terjadi juga di kampus-kampus terutama kampus-kampus yang berada di kota Makassar. Baik konflik internal di dalam kampus maupun konflik antarkampus, dapat mengakibatkan konflik sampai ke daerah, bahkan menjadi konflik etnis.

Sebagai contoh, terdapat kelompok-kelompok atau perhimpunan mahasiswa dari daerah tertentu yang mengatasnamakan asal daerah atau etnis, misalnya Ikatan Pelajar/Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL), Ikatan Pelajar/Mahasiswa Tator, Ikatan Pelajar/Mahasiswa Bone, dll. Kelompok-kelompok seperti ini tumbuh subur, tetapi keberadaannya tidak diantisipasi baik oleh pihak kampus maupun pemerintah. Mereka berkembang sendiri-sendiri, sehingga ego kedaerahan muncul dengan cukup kuat. Hal tersebut juga dipicu oleh kegiatan pemilihan kepala daerah, di mana perhimpunan mahasiswa ini telah diperalat oleh partai-partai politik tanpa memikirkan akibatnya.⁷

Konflik horizontal yang sering terjadi di kota Makassar pada umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda dan mahasiswa, seperti konflik Palopo (Luwu

Raya), Bone, Bulukumba, Bima, dll. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah asal sebagian pemuda dan mahasiswa di kota Makassar. Sebenarnya tidak terlihat kelompok atau pendatang yang dominan, tetapi hal itu justru menimbulkan sifat gengsi dan menonjolkan sikap fanatisme kedaerahan yang akhirnya memicu konflik karena masing-masing merasa sebagai kelompok mayoritas. Konflik perorangan bisa berakibat cukup fatal sebab mereka mengatasnamakan solidaritas kedaerahan, sehingga berkembang menjadi konflik antardaerah.

Konflik yang sering terjadi, baik di lingkungan internal kampus maupun antar-kampus, bisa juga dilihat, misalnya, antara etnis Luwu dan Bone. Konflik bermula ketika ada seorang mahasiswa Luwu pulang ke daerahnya kemudian orang Bone yang di daerah Luwu diusirnya, sebab ada informasi bahwa asrama mahasiswa Luwu yang ada di kota Makassar telah dibakar oleh orang-orang Bone, bahkan dikabarkan ada mahasiswanya yang luka dan diberitakan meninggal. Setiap mahasiswa Bone di-*sweeping* termasuk plat nomor polisi motor serta mobil Bone. Hal ini terus berlanjut hingga kedaerah-daerah lain. Begitu juga sebaliknya, orang Luwu yang ada di wilayah Bone akan diusir. Hal ini merupakan cikal bakal masalah yang kemudian meluas menjadi kerusuhan etnis, padahal sebetulnya yang terjadi hanya kerusuhan di dalam kampus dan berita yang disebarkan sebetulnya hanya rumor. Namun, rumor itu menyebabkan konflik kampus berkembang meluas menjadi konflik etnis. Konflik etnis lainnya muncul antara etnis Bulukumba dengan Luwu.

Konflik antardaerah⁸ semakin hari semakin marak terjadi di wilayah kota Makassar. Hal ini diduga oleh beberapa kalangan merupakan konflik lama dari sejarah feodalisme masyarakat Sulawesi Selatan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa konflik tersebut sudah didesain oleh para elite politik untuk mengalihkan isu-isu yang sedang terjadi. Oleh karena itu, keberadaan paguyuban berdasarkan kedaerahan belum memberi kontribusi untuk mengatasi konflik tersebut, meskipun di antara mereka memiliki sikap saling menghormati satu sama lain.

⁷Wawancara dengan Drs. H.S. M.Si, Kabag Tata Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 29 Mei 2012 di Makassar.

⁸Selain konflik antaretnis, sering pula terjadi konflik antardaerah yang acapkali dipicu oleh persoalan-persoalan sepele dalam relasi sosial masyarakat Kota Makassar.

Adanya paguyuban berdasarkan etnis dan kedaerahan di wilayah Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar, memperlihatkan betapa variatifnya kondisi masyarakat setempat. Walaupun demikian, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, posisi kekuasaan tertentu tetap saja dikuasai oleh etnis tertentu, dan hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Namun, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang duduk di pemerintahan di kota Makassar tidak lagi didominasi oleh satu kelompok etnis tertentu. Memang masih ada posisi-posisi yang dikuasai oleh etnis tertentu, tetapi tidak begitu menonjol. Berbeda halnya dengan wilayah di luar kota Makassar yang ikatan etnis dan kedaerahannya masih sangat menonjol dan kuat. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh salah seorang narasumber, TM (Kasubag Pemerintahan Kota Makassar).⁹ Beliau mengatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga keturunan bangsawan yang bergelar "Andi" dan karir pertamanya adalah sebagai camat di daerah asalnya, yaitu Bone. Pada waktu dulu, di wilayahnya tidak ada yang berani menduduki posisi atau jabatan seperti camat, kades, lurah bahkan bupati. Hal ini disebabkan kuatnya ikatan emosional berdasarkan etnis dan identitas keturunan kebangsawannya. Oleh karena itu, masyarakat atau penduduk yang tinggal di wilayah Bone yang bukan berasal dari etnis Bone dan bukan berasal dari keluarga raja atau bukan berasal dari keturunan bangsawan tidak akan pernah bisa menduduki posisi puncak atau menjadi pimpinan tertinggi, dan hal ini masih terjadi hingga saat ini.

Modal Sosial dan Kewargaan

Sejalan dengan perkembangan jaman, perubahan yang cepat yang terjadi di kehidupan masyarakat kota Makassar saat ini tanpa disadari mulai menggerus nilai-nilai lama yang berusaha dipertahankan oleh sebagian masyarakatnya. Seperti dalam hal pengkastaan, jelas sekali bahwa gelar kebangsawanan tidak lagi dianggap sebagai penentu tinggi rendahnya status sosial seseorang di mata masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat yang berada di beberapa wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan yang masih sangat kental

dengan unsur feodal, yang masih mempertahankan nilai-nilai kebangsawanan, seperti dalam menduduki sebuah jabatan di pemerintahan. Namun, berdasarkan informasi dari beberapa narasumber, pada saat ini di beberapa wilayah kabupaten juga sudah mulai ada pergeseran nilai seperti yang terjadi di kota Makassar. Faktor kekayaan tidak lagi diperhitungkan. Kini, pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam menduduki sebuah jabatan struktural di lingkungan pemerintahan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi status sosial dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar adalah sebagai berikut.

- (1) Faktor jabatan atau posisi di pemerintahan: Kesempatan yang sama diberikan kepada Ana'karaeng, Tu Maradeka, maupun Ata untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Siapapun yang menjabat, pasti akan mendapat penghormatan lebih dari masyarakat. Sekalipun seseorang berasal dari kasta Ata, tetapi jika ia memiliki jabatan strategis, sudah dapat dipastikan ia akan dihormati dan akan mendapat status sosial yang tinggi di mata masyarakat.
- (2) Faktor kekayaan: Sudah menjadi pengetahuan umum, mereka yang bisa dikatakan berlimpah kekayaannya akan dihormati. Hal ini sudah sejak jaman dulu terjadi, bahkan sudah bersifat turun temurun.
- (3) Faktor pendidikan: Saat ini, faktor pendidikan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, dan kota Makassar khususnya. Pengaruh tingkat pendidikan seseorang sangat berperan sentral dalam menentukan status sosialnya. Jauh berbeda dengan masa lalu, ketika masyarakat yang bisa mengenyam pendidikan hanyalah mereka yang berasal dari keturunan bangsawan atau masyarakat yang berasal dari kasta paling tinggi, saat ini semua masyarakat Sulawesi Selatan tanpa kecualimempunyai hak dan kewajiban juga kesempatan yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan sampai jenjang tertinggi, baik itu orang yang berasal dari keturunan bangsawan maupun masyarakat biasa. Jadi, saat ini tidak ada lagi anggapan bahwa pendidikan dan pengetahuan hanyalah menjadi milik dari kelompok masyarakat

⁹Wawancara dengan narasumber TM, Kasubag Pemerintahan Kota Makassar, tanggal 29 Mei 2012 di Makassar.

yang berasal dari keturunan bangsawan atau kasta tertinggi di Sulawesi Selatan saja.¹⁰

Saat ini gelar akademik menjadi sumber status baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang bukan berasal dari keturunan bangsawan berlomba-lomba untuk dapat meraih pendidikan sampai ke jenjang paling tinggi, yakni perguruan tinggi. Berbagai gelar yang diraih dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu sosial, seperti sastra, hukum, ekonomi, manajemen, teknik, maupun kedokteran, merupakan modal utama bagi masyarakat biasa agar bisa bekerja di lingkungan pemerintahan juga swasta dan mendapatkan kedudukan yang tinggi, serta dapat disejajarkan dengan masyarakat keturunan bangsawan yang juga memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

Sekarang siapapun bisa menduduki sebuah jabatan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, asalkan memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dan kompeten di bidangnya. Kepercayaan masyarakat biasa terhadap keluarga keturunan bangsawan telah mengalami pergeseran karena masyarakat sudah sangat pandai dan menyadari bahwa dari kalangan masyarakat biasa pun mempunyai kesempatan yang sama dan bahkan sama sederajat dengan keluarga keturunan bangsawan. Masyarakat biasa dan keturunan bangsawan kini memiliki kesempatan yang sama menduduki jabatan apa pun di pemerintahan dan di luar pemerintahan. Bahkan, ada di antaranya yang memperoleh gelar “Andi” karena posisi atau jabatan yang dipegangnya. Hal tersebut telah memperlihatkan bahwa di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar, kesempatan dan kepercayaan terhadap masyarakat biasa sudah mengalami pergeseran dan terbuka.¹¹

Pergeseran ini juga secara perlahan-lahan mulai terlihat di beberapa wilayah di luar kota Makassar seperti contohnya di salah satu kecamatan di kabupaten Jeneponto. Di wilayah tersebut banyak masyarakatnya berasal dari keturunan bangsawan dan tersebar di beberapa wilayah. Pada awalnya, kepala pemerintahan dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari kalangan keturunan bangsawan. Namun, akhir-

akhir ini mulai ada pergeseran, seperti yang disampaikan oleh salah seorang narasumber. Menurut narasumber tersebut, mulai ada pergeseran kepemimpinan di wilayah kabupaten Jeneponto. Jabatan-jabatan struktural di lingkungan pemerintahan tidak lagi hanya diduduki oleh keturunan bangsawan tetapi juga oleh kalangan masyarakat biasa.

Pada awalnya sempat terjadi keributan. Keributan ini terjadi karena masyarakat keturunan bangsawan merasa keberatan dengan adanya kepemimpinan yang dikepalai oleh seseorang yang berasal dari masyarakat biasa. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan adanya pergeseran status sosial di masyarakat Bugis-Makassar. Oleh karena itu, status sosial tidak lagi didasarkan pada keturunan, kasta, atau stratifikasi sosial seseorang. Di masa sekarang, jabatan struktural di pemerintahan, kekayaan, dan tingkat pendidikan lebih dominan berpengaruh dalam menentukan derajat sosial seseorang. Pergeseran ini semakin terlihat dengan jelas sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut pendapat Mattulada dalam buku *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan* (2009), komposisi kaum elit telah mengalami perubahan. Mattulada membedakan empat kelompok utama golongan elite baru, yaitu bangsawan, pegawai negeri, intelektual, dan penguasa. Sebenarnya keempat kelompok elite ini telah saling berpenetrasi sebab seorang keturunan bangsawan juga bisa jadi pegawai, intelektual, bahkan pengusaha. Selain itu, dalam kategori tersebut, orang juga dapat digolongkan menjadi militer dan non-militer. Mattulada menghitung, diperkirakan 50% dari pejabat tinggi di Sulawesi Selatan berasal dari kalangan militer yang telah diberi jabatan sipil. Oleh karena itu, pentingnya keanggotaan ke dalam salah satu dari keempat kelompok tersebut kurang lebih sama, yang menyebabkan hanya sepertiga dari pejabat tinggi berasal dari kalangan keturunan bangsawan.

Pengaruh dan Peran Kelompok Sosial Budaya

Seperti telah diuraikan di atas, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki paguyuban berdasarkan kedaerahan yang pada awalnya mempunyai fungsi untuk kegiatan sosial, tetapi pada saat pilkada beralih fungsi sebagai kendaraan politik dalam mencari suara. Pengaruh dari

¹⁰<http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/pergeseran-status-sosial-dalam-masyarakat-bugis-makassar/>

¹¹Wawancara dengan narasumber Dr. R, Sekretaris Jurusan Sosiologi UNHAS, tanggal 31 Mei 2012 di Makassar.

keberadaan paguyuban tersebut dalam aspek sosial budaya, khususnya pada masyarakat kota Makassar, sebetulnya tidak begitu tampak. Hanya pada saat tertentu saja paguyuban-paguyuban ini mulai bermunculan untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu ketika ada momen tertentu saja, seperti pada saat perayaan hari besar, karena pada waktu lain kegiatan mereka hanya biasa-biasa saja. Lebih lanjut, kegiatan lain dari paguyuban tersebut hanya terbatas kepada kegiatan arisan atau halal bilhalal berdasarkan kedaerahan. Namun, dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut, mereka tidak akan meminta bantuan kepada paguyuban yang lain, sebab satu sama lain sangat memegang budaya *siri*.

Meskipun demikian, rasa kepercayaan di antara berbagai paguyuban tersebut cukup tinggi. Ada koordinasi antara paguyuban-paguyuban yang ada pada momen-momen tertentu, seperti penyelenggaraan pesta budaya Sulawesi Selatan. Acara tersebut merupakan acara kebudayaan dan secara otomatis hampir seluruh paguyuban tersebut bersatu untuk bersama-sama memeriakannya, tanpa mempermasalahakan identitas paguyuban masing-masing. Satu sama lain saling memberi kepercayaan, sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Sementara itu, peran kelompok sosial merupakan salah satu aspek dinamis dari status seseorang untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan status, sehingga antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena satu sama lain ada ketergantungan.

Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan itu mempunyai dua segi yaitu:

- (1) Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang harapan. Hal ini merupakan kewajiban.
- (2) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakatnya. Hal ini merupakan hak pemegang peran.

Akan tetapi jika ditinjau dari segi cakupannya, peranan meliputi 3 (tiga) hal, yakni:

- (1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyarakat. Contoh: sebagai seorang pemimpin harus dapat menjadi panutan dan suri teladan para anggotanya, karena dalam diri pemimpin tersebut tersandung aturan/norma-norma yang sesuai dengan posisinya;

- (2) Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Contoh: seorang ulama, guru dan sebagainya harus bijaksana, baik hati, sabar, membimbing dan menjadi panutan bagi para muridnya; dan
- (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Contoh: suami/isteri, karyawan, pegawai negeri, dsb, merupakan peran dalam masyarakat yang membentuk struktur atau susunan masyarakat.

Jika dilihat dari fungsinya, peranan mempunyai beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain, yaitu:

- (1) Peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai ayah atau ibu,
- (2) Peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat, seperti peran dokter, pekerja sosial, dll, dan
- (3) Peranan juga dimainkan seseorang yang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang lelaki sebagai suami/bapak, seorang wanita sebagai isteri/ibu, dsb.

Dari uraian di atas, peran dan keberadaan paguyuban di provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam aspek sosial-budaya, termasuk hal yang penting. Namun, sangat disayangkan bahwa fungsi dari paguyuban seringkali beralih menjadi kendaraan politik dalam pemilu ataupun pilkada. Oleh karena itu, peran dan keberadaan paguyuban tersebut harus tetap dipertahankan, jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan sekelompok orang yang memanfaatkan keberadaannya dan tidak bertanggungjawab. Walaupun kegiatan-kegiatannya hanya bersifat temporer, keutuhan paguyuban-paguyuban tersebut tetap diperlukan untuk mempertahankan solidaritas sosial masyarakat setempat. Lebih lanjut, keberadaan paguyuban harus difikirkan untuk kepentingan keutuhan masyarakat dalam jangka panjang, bukan hanya sekadar untuk kepentingan politik yang bersifat sesaat.

Namun demikian, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa memang betul fungsi dari paguyuban ini sudah beralih, walaupun tidak dipungkiri bahwa fungsi yang sesungguhnya, yakni berupa kegiatan sosial, masih tetap dilaksanakan. Dengan kata lain, peran dan keberadaan paguyuban-paguyuban tersebut masih terus bertahan karena mereka selalu berpedoman pada tradisi *siri na pesse* atau budaya malu. Perlu diketahui juga bahwa budaya *siri* masyarakat Bugis-Makassar pengertiannya sangat luas sehingga komitmen untuk memegang teguh budaya tersebut sangat tinggi dan pantang dilanggar.

Penutup

Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki masyarakat sangat heterogen. Selain itu, Sulawesi Selatan mempunyai empat etnis besar, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Menurut sejarahnya, Sulawesi Selatan memiliki tiga kerajaan besar yakni Bone, Gowa, dan Luwu. Ketiga kerajaan besar tersebut satu sama lain telah memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan; masyarakat yang merasa berasal dari keturunan bangsawan atau raja menganggap dirinya memiliki strata paling tinggi. Memang betul pada masa lalu masyarakat yang berasal dari keturunan bangsawan atau raja menduduki strata paling tinggi. Hal ini terlihat pada stratifikasi sosial masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Pada masa lalu, keturunan bangsawan mendapat posisi yang sangat istimewa, yaitu sebagai elite masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kedudukan masyarakat keturunan bangsawan mengalami pergeseran.

Stratifikasi sosial yang ada lama kelamaan luntur. Sejak pemerintahan Belanda sebenarnya klasifikasi status sosial berdasarkan kasta sangat tidak disetujui dan dalam ajaran agama Islam dilarang adanya pengkastaan dalam masyarakat. Pada akhirnya, sistem pengkastaan atau pembagian strata mulai hilang. Begitu juga gelar kebangsawanan yang selama ini digunakan yang mulai memudar, sehingga penggunaannya hanya terbatas kepada kegiatan upacara adat atau acara ritual saja. Pemberian gelar kebangsawanan tersebut hanya sebagai penghormatan bahwa mereka memang betul merupakan keturunan bangsawan, tidak lebih dari itu. Status sosial tidak lagi didasarkan pada

keturunan, kasta, maupun stratifikasi sosial seseorang.

Begitu juga di lingkungan pekerjaan seperti di pemerintahan. Kini tidak lagi mengutamakan status kebangsawanan seseorang, atau kekayaannya, melainkan ditentukan oleh tingkat pendidikan. Peranan pendidikan lebih dominan dan sangat berpengaruh dalam menentukan derajat sosial seseorang. Menurut sejarahnya, stratifikasi sosial masyarakat Bugis-Makassar telah memberikan posisi istimewa terhadap keturunan bangsawan sebagai elitestrategis dari masyarakat, sehingga menempatkan mereka sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur politik atau struktur kekuasaan. Dewasa ini, hal tersebut sudah jauh berbeda karena semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat biasa, mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang serta memiliki hak dan kewajiban yang sama pula.

Meskipun demikian, stratifikasi sosial berbasis keturunan relatif masih berlaku di daerah-daerah Sulawesi Selatan lainnya. Memudarnya stratifikasi sosial berbasis keturunan yang berlangsung di Kota Makassar belum diikuti oleh daerah-daerah lain di provinsi ini.

Daftar Pustaka

- BPS dan Bappeda Sulawesi Selatan. (2011). *Makassar Dalam Angka 2011*. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Bappeda dan BPS Kota Makassar. (2009). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar 2009*. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Fatimah, Nyayu (editor). (2011). *Dinamika Kewargaan Kelompok Sosial di Perkotaan; Kasus Kelompok Pekerja Profesional Bidang Kesehatan*. Jakarta: LIPI Press.
- Koentjaraningrat. (1976). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Mattulada. (1998). *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken (editor). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nukman, Usman, & Usdar Nawawi. (2010). *Makassar Dalam Tren Global*. Makassar: Pelita Pustaka.

- Pelras, Chistian. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Forum Jakarta-Paris, Ecole francaise d'Extreme-Orient.
- Ratnawati, Tri. (2005). "Demokrasi di Tengah Masyarakat Feodalistik: Kasus Kota Makassar dan Kabupaten Bone", dalam Syamsuddin Haris (editor), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratnawati, Tri. (2006). "Partai dan Demokrasi Pura-Pura? Dinamika Partai di DPRD Makassar dan Bone", dalam Syamsuddin Haris (editor), *Partai & Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Tol, Roger, Kees Van Dijk, dan Greg Acciaioli. (2009). *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Jakarta: KITLV.
- Zuhro, Siti, dkk. (2011). *Model Demokrasi Lokal Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Jakarta: TIFA.

Bahan Dari Internet

<http://sosbud.kompasiana.com/2011/08/24/pergerakan-status-sosial-dalam-masyarakat-bugis-makassar/>

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/08/24/akar-konflik-sosial-komunitas>.

infosos.wordpress.com/kelas-xi-ips/struktur-sosial/.
REPI20 Desember 2011 17:24.

<http://jurnallontar.com/?p=190>.

<http://sosiologiuntukindonesia.blogspot.com/2012/02/makalah-stratifikasi-sosial.html>,
Senin, 13 Februari 2012.